

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Program Pelayanan Langsung Tuntas di Dinas Penanaamn Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Khususnya Pada Pelayanan IMB sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa variabel yang belum berjalan dengan baik.

Variabel standard dan sasaran kebijakan dalam tim Program Pelayanan Langsung Tuntas ini sudah paham maksud dan tujuan dari program ini serta dalam pelaksanaan sudah tepat sasaran. Pada variabel sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam pelaksanaan Program Pelayanan Langsung Tuntas sudah memadai dan mampu menjalankan kegiatan dengan baik. Pada variabel karakteristik agen pelaksana, dari segi struktur birokrasi dalam pelaksanaan program ini tidak ada struktur birokrasi serta tidak norma/kesepakatan didalam tim yang mana itu akan mempengaruhi juga terhadap komunikasi dan koordinasi pada saat pelaksanaan program tersebut. Hal ini menyebabkan berpengaruh terhadap kerja tim tersebut dalam pelaksanaan program seperti terjadi kesalahpahaman antar implementor dalam tim pelaksanaan program tersebut. Pada bagian disposisi pelaksana sudah berjalan dengan baik seperti instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut mendukung terhadap program yang dikeluarkan serta mengerti terhadap tujuan dari dikeluarkannya program tersebut. Dalam pelaksanaan program ini memberikan

dampak positif terhadap pengurusan perizinan yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan perizinan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) serta dengan adanya program ini masyarakat bisa menghemat waktu dan biaya selama pengurusan perizinan. Program ini mendapatkan dukungan dari Bupati Padang Pariaman serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis data yang telah dipaparkan, peneliti menyarankan beberapa hal kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman selaku implementor dari Program Pelayanan Langsung Tuntas:

1. Perlunya dibuat regulasi mengenai struktur organisasi dalam tim ini karena dengan adanya struktur organisasi ini memiliki rentang kendali yang jelas dalam pelaksanaan program ini.
2. Perlu dibuatkan SOP dalam tim ini agar dalam pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik.
3. Dalam hal koordinasi perlu ditingkatkan antar implementor agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman antar implementor.